

**KESENGJANGAN PENDAPATAN PROVINSI DI KAWASAN
TIMUR INDONESIA PERIODE 2005 - 2010**

Vera Paulin Kay

Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Ambon
verapaulinkay@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia have different area characteristic belonging area of nature resources, human resources, social condition and culture, with conduct area because the area characteristic have strong effect of formed development economic, so that's not astonishing, when the pattern of economic development in Indonesia area, is not control and will be effect to the ability to grow and will be caused to several area can grow quickly but the other area grow slowly.

But the way, the ability for growing is different and will be caused disparity of development conduct area. Disparity of development will go on and formed the aspect and dimension. Based on the condition the purpose of this research to analyzed the disparity of development which become conduct the province in east Indonesia area.

The kinds of data which used in this research is data secunder. Data which need is data Gross National Product of province, based on constnt price.

Based on the achivment research, showed that value index disparity of conduct province in east Indonesia area is different in high level.

Key Words: Disparity, Gross National Product

ABSTRAK

Indonesia memiliki perbedaan karakteristik wilayah dalam hal kepemilikan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), kondisi sosial dan budaya serta letak geografis wilayah karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh yang kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, maka tidak mengherankan bila pola pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia tidak seragam. Ketidakseragaman ini akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya akan mengakibatkan pada beberapa wilayah mampu tumbuh cepat sedangkan wilayah yang lainnya tumbuh lambat. Selanjutnya kemampuan untuk tumbuh berbeda ini akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan ini berlangsung dan berwujud aspek dan dimensi. Sehubungan dengan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan pembangunan yang terjadi antar provinsi di kawasan Timur Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang di perlukan meliputi data PDRB per kapita menurut provinsi berdasarkan harga constant.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks ketimpangan antar provinsi di Kawasan timur Indonesia berada pada tingkat yang tinggi.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan (disparitas), Pendapatan Perkapita

1. PENDAHULUAN

Disparitas regional merupakan fenomena universal. Di semua Negara tanpa memandang ukuran dan tingkat pembangunannya, disparitas pembangunan merupakan masalah pembangunan antar wilayah yang tidak merata. Pada banyak Negara, pembagian ekonomi yang tidak merata telah melahirkan masalah – masalah politik.

Pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung mengabaikan terjadinya kesenjangan – kesenjangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar. Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang didalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai sebagai bangsa. Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah atau kawasan pada satu sisi terjadinya dalam bentuk buruknya distribusi alokasi pemanfaatan sumberdaya yang menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya system ekonomi (Tulus Tambunan, 2001)

Ketidakseimbangan ini akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya akan mengakibatkan pada beberapa wilayah untuk mampu untuk tumbuh cepat sementara wilayah yang lainnya

tumbuh lambat. Selanjutnya kemampuan untuk tumbuh ini akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun dari sudut pandang pembangunan Nasional menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah hal yang kurang disukai dan lebih sering menimbulkan berbagai kerugian daripada keuntungan atau manfaat (wijaya,2003). Sedangkan menurut Sjafrizal (2008), ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini. Kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana setiap daerah terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

Kawasan Timur Indonesia selama ini dianggap sebagai wilayah yang terbelakang dilihat dari pembangunan ekonomi karena pembangunan ekonomi selama ini lebih berorientasi pada Jawa dan beberapa wilayah di kawasan Barat Indonesia (KIB). Hal ini telah menimbulkan ketimpangan semakin lebar dibandingkan dengan antara KIB dan KIT, padahal KIT memiliki Potensi Sumber daya alam yang sangat Besar. Dengan Luas 5,8 juta km², kawasan timur Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, 46 persen potensi kelautannya berada di wilayah KIT. Potensi kekayaan tambang dan migas, serta kekayaan hutan dan perkebunan yang melimpah dimana hutan produksi mencapai 76,0 % dari hutan di Indonesia. Produksi hutan pada tahun 2010 di KIT adalah RP 242 triliun dan ternyata jumlah ini lebih kecil dari produksi hutan di KIB di mana pada tahun yang sama mencapai RP 1.119 triliun dan ternyata jumlah ini lebih kecil dari produksi hutan di KIT selesai pada tahap bahan mentah, sedangkan di KIB mencapai tahap barang jadi. Dengan perkataan lain, nilai tambah banyak dinikmati oleh KIB (Adi, wijaya 2003). Perkembangan PDRRB kawasan timur Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat Pada tabel ini

**PDRB Kawasan Timur Indonesia
Tahun 2005 - 2010**

Provinsi	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sulawesi Utara	8.814.194	9.840.920	24.052.100	28,664,3	32.931.100	36,793,00
Gorontalo	7.458.722	8,219,235	4,761	5,906,700	7,069,100	8,056,500
Sulawesi Tengah	6.895.138	7,982,347	22,294,100	27,495,400	31,120,400	35,373,500
Sulawesi Selatan	6.612.777	7,628,241	69,107,100	84,966,300	99,757,700	117,612,100
Sulawesi Barat	3.774.298	4,314,951	6,192,800	8,296,600	9,403,400	10,986,600
Sulawesi Tenggara	4.562.244	5,162,733	17,953,100	22,202,800	25,655,900	28,369,100
Maluku	3,259,244	5,079,837	5,698,799	6,269,710	7,069,093	8,084,807
Papua	23,256,691	23,761,847	55,380,500	61,516,200	77,728,600	89,451,200
Papua Barat	12,307,355	12,994,588	7,449,600	9,778,900	12,031,500	13,696,900
Total	38,823,290	75,143,779	184,080,760	226,432,610	269,835,693	311,630,707

Secara umum dapat dijelaskan bahwa proporsi PDRB KIT terhadap PDRB total mengalami kenaikan. Perkembangan PDRB per kapita dan besarnya PDRB di Provinsi – provinsi KIT tidak dapat dikatakan sebagai indikator yang mampu menggambarkan kesejahteraan social di seluruh provinsi. Berdasarkan data PDRB yang ada maka terdapat kesenjangan antar provinsi. Jumlah PDRB perkapita terbesar di kawasan timur Indonesia adalah terdapat pada provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007 sebesar Rp 69,107,100 dan mengalami peningkatan terus pada tahun 2010 sebesar Rp 117,612,100. Angka ini jauh melebihi angka rata – rata PDRB per kapita provinsi – provinsi Kawasan Timur Indonesia yang jumlahnya hanya mencapai Rp 20.786.751 pada tahun 2007, kemudian tahun 2010 sebesar 34.625.634. Sehingga dapat dikatakan bahwa provinsi Sulawesi selatan adalah provinsi adalah provinsi yang paling maju di kawasan Timur Indonesia dan memiliki kontribusi yang cukup besar

Bila dikategorikan provinsi – provinsi yang memiliki PDRB perkapita di bawah rata – rata kawasan Timur Indonesia adalah provinsi Maluku dan Gorontalo. Sedangkan provinsi yang mengalami peningkatan PDRB setiap

tahyang sangat tinggi adalah provinsi Sulawesi utara,Sulawesi tengah,Sulawesi Selatan,Sulawesi Barat,Sulawesi Tenggara,Papua dan Papua Barat.Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melihat seberapa besar kesenjangan yang terjadi di kawasan Timur Indonesia.Dengan melihat latar masalah yang ada di atas,maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kesenjangan pendapatan yang terjadi di kawasan timur Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Kesenjangan Pendapatan kawasan Timur Indonesia. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan dalam melakukan berbagai kebijakan

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori pertumbuhan regional adalah penambahan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut,hal ini juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi factor – factor produksi yang beroperasi didaerah tersebut yang berarti kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar transfer- payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau mendapat aliran dana di luar wilayah.

Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori ekonomi adalah a) keuntungan lokasi, b)Aglomerasi Migrasi, C) Arus lalu lintas Modal antar wilayah.

Ketimpangan pendapatan sebenarnya telah terjadi di seluruh Negara di dunia ini,baik Negara maju maupun Negara – negara yang sedang berkembang. Namun perbedaannya adalah ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di Negara – Negara yang baru memulai pembangunannya,sementara bagi Negara maju atau lebih tinggi tingkat pembangunan lebih merata atau tingkat ketimpangannya lebih rendah. Keadaan ini antara lain dijelaskan oleh Todaro (2003) bahwa Negara – Negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan Negara – Negara dunia ketiga yakni kelompok Negara yang sedang tergolong sedang berkembang.

Dua model ketimpangan yaitu teori Harold – Domar Neoklasik,memberikan perhatian khusus pada peranan capital yang dapat di presentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik capital kepada daerahnya, hal ini akan jelas berpengaruh kepada kemampuan daerah untuk bertumbuh sekalipun menciptakan perbedaan dalam kemampuan untuk menghasilkan pendapatan investasi lebih menguntungkan bila dialokasikan di daerah – daerah yang mampu menghasilkan return (pengembalian) yang besar pada waktu relatif cepat. Mekanisme pasar akan justru menyebabkan ketidakmerataan dimana daerah – daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat,sementara daerah yang kurang maju relative lambat, Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah. Sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang diseluruh wilayah dalam Negara.

Ada beberapa factor yang menentukan ketimpangan antar wilayah,antara lain yaitu (Syafrizal,2008):

a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yangsangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing – masing daerah.Perbedaan sumber daya ala mini akan jelas mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan sumber daya alam yang cukup tinggi akan memproduksi barang – barang tertentu dengan relative murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alm yang rendah.Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat.Sedangkan daera lain mempunyai kandungan sumber daya alm lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang – barang dengan biaya produksi lebih tinggi dan sehingga daya saingnya menjadi lemah.

b. Perbedaan Kondisi Geografis

Faktor lain yang mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan,perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan,perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang di miliki masyarakat bersangkutan.

Kondisi demografis ini akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat yan bersangkutan.Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan perumbuhan daera ekonomi yang bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relative rendahnya produktivitas kerja masyarakat

setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan dan migrasi baik yang di sponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

d. Konsentrasi Kegiatan ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama karena adanya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Alokasi investasi pemerintah daerah lebih banyak di tentukan oleh system pemerintahan daerah yang dianut. Bila system pemerintah daerah bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya dimana system pemerintah yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sector pendidikan kesehatan, jalan, irigasi dan listrik. Semua sector ini akan memberikan dampak pada tenaga kerja, pendapatan perkapita dan pada akhirnya akan meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut.

Besar kecilnya hasil PDRB suatu wilayah dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam yang dimanfaatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia, kebijaksanaan pemerintah, letak geografis serta tersedianya sarana dan prasarana. Dalam menghitung pendapatan regional, BPS (1999) memasukkan seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sector yang melakukan usahanya di suatu wilayah tanpa memperhatikan pemilik atas factor – factor produksi. Dengan demikian PDRB secara keseluruhan menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan pada factor – factor produksi yang ikut berpartisipasi.

3. METODOLOGI

Peneletian ini merupakan peneletian yang bersifat analisis deskriptif kuantitatif yang berupaya menjelaskan tentang ketimpangan pendapatan yang terjadi di kawasan timur Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2005 – 2010 yang di peroleh dari Biro Pusat Statistik.

3.1 Teknik Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan Indeks Williamsons untuk menghitung ketimpangan antar wilayah Di Kawasan Timur Indonesia, dengan menggunakan rumus :

$$cv_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 f_i/n}}{\bar{Y}}$$

Keterangan :

CV_w – Indeks Williamson

F_i – Jumlah penduduk provinsi kota ke-I (jiwa)

N – Jumlah penduduk kawasan timur Indonesia

Y_i – PDRB per kapita provinsi / kota ke-I (Rupiah)

\bar{Y} - PDRB per kapita rata-rata Provinsi kawasan timur Indonesia (Rupiah).

Besarnya V_w adalah $0 \leq V_w \leq 1$

$V_w = 0$, berarti pembangunan wilayah sangat merata

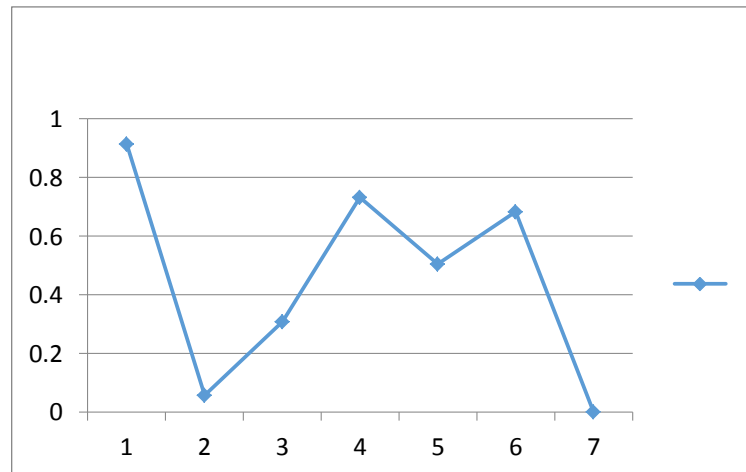
$V_w = 1$, berarti pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan Sempurna)

$V_w \rightarrow 0$, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata

$V_w \rightarrow 1$, berarti pembangunan wilayah semakin tidak merata

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan yang disebabkan oleh tidak meratanya pelaksanaan pembangunan antar lapisan masyarakat dan daerah akan mengakibatkan makin timpangnya aspek ekonomi. Ketimpangan ekonomi terlihat dari semakin timpangnya distribusi pendapatan tersebut membawa banyak konsekuensi negatif, salah satunya semakin tinggi tingkat kemiskinan. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah pendapatan regional. Kalau dilihat dari produksi, pendapatan regional tidak lain adalah PDRB yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit – unit produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Sedangkan dari sudut pandang pendapatan, pendapatan regional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat ketimpangan di Kawasan Timur Indonesia adalah Indeks Williamsons.



Berdasarkan dengan hasil perhitungan dengan menggunakan hasil Indeks Williamsons diketahui bahwa ketimpangan antar wilayah pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 0,915 hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan perkapita di masing – masing provinsi kawasan Timur Indonesia, sementara jumlah penduduk mengalami peningkatan dan berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 0.057 dan tahun 2007 sebesar 0.308 . Memperkecilnya Indeks Williamsons Pada tahun 2006 dan 2007 menunjukkan membaiknya kondisi makro kawasan timur Indonesia, dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi masing – masing daerah dan meningkatnya percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia yang menyebabkan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan tinggi sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian pada Indeks Williamsons mengalami kenaikan dan pada tahun 2008 lebih sebesar 0.732. Terjadinya peningkatan Indeks Williamsons ini disebabkan karena jumlah penduduk tidak terlalu besar kawasan Timur Indonesia sehingga peningkatan PDRB tersebut menyebabkan pendapatan perkapita penduduk lebih tinggi. Selanjutnya pada tahun 2009 dan tahun 2010 Indeks Williamsons 0.505 dan 0.683 hal ini disebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil diskriptif dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan perhitungan Indeks Williamsons, maka selama periode 2005 – 2010 terjadinya ketimpangan antar wilayah

6. SARAN

Kegiatan Perekonomian di Kawasan Timur Indonesia dapat berjalan dengan baik, harus didukung dengan perbaikan infrastruktur. Dengan membaiknya infrastruktur akan memberikan dampak terhadap perbaikan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Wijaya ,et al.2003.Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi Daerah Jakarta : P2E LIPI
- Kuncoro, Mudrajad ,2004. “Otonomi Daerah dan Pembangunan daerah : I Reformasi,Perencanaan,Strategi dan Peluang,”Penerbit Erlangga,Jakarta
- Lukman Edy,2009.”Mengurangi Kesenjangan”.Republika 1 Agustus 2009
- Sjafrizal,2008”Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Regional Indonesia Bagian Barat.”Prisma,3 Maret.
- Statistik Indonesia Berbagai tahun Terbitan,Biro Pusat Statistik
- Tambunan, Tulus.2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris.Jakarta:Ghalia Indonesia
- Todaro,2003.Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga,Edisi ke Delapan.Penerbit Erlangga Jakarta